

## ADAT DAN PILKADA ; ANALISIS PERAN PEMANGKU ADAT DALAM DEMOKRASI LOKAL

**Mhd Fajri**

Departemen Ilmu Politik, Fisip, Universitas Andalas (correspondence author)

[mhdfajri@soc.unand.ac.id](mailto:mhdfajri@soc.unand.ac.id)

### **Abstrak**

Tulisan ini membahas adat dan Pilkada. Adat dan Pilkada dimaknai dalam lingkup bagaimana peran pemangku adat memainkan peran penting dalam demokrasi lokal yakni konstestasi Pilkada. Terdapat dukungan dari pemangku adat kepada calon kepala daerah. Setidaknya dukungan ini diberikan kepada dua pasang kepala daerah yakni pasangan jalur perseorangan dan petahana. Hasil Pilkada kemudian menyatakan bahwa kedua pasang calon kepala daerah ini berhasil keluar diposisi dua teratas dari lima pasang calon yang berkompetisi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan penarikan informan penelitian menggunakan teknik purposive sampling. Teori yang digunakan untuk membantu penelitian ini adalah toerisasi dari Fredrik Barth (1969) dari pendekatan instrumentalis yang melihat etnik dalam politik adalah sebuah proses manipulasi atau mobilisasi etnik untuk menunjukkan etnis masing – masing. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pemangku adat memainkan peran penting yakni sebagai mobilisator basis massanya melalui instrumen adat untuk mendukung calon tertentu dalam Pilkada. Kekuasaan dan jaringan instrument adat tersebut dimanfaatkan sebagai sarana dalam menyampaikan pesan dukungan untuk mendukung calon – calon peserta pemilu dalam berbagai bentuk. Adat dalam temuan penelitian ini menjadi instrumen dari pemangku adat.

**Kata Kunci :** Pemangku Adat ; Mobilisasi ; Pilkada ; Suku (clan)

### **Abstract**

*This paper discusses Adat and Local Election. Adat and Local Election are interpreted in terms of how the role of Adat stakeholders plays an important role in local democracy ; the contestation of the Local Election. There is support from traditional stakeholders for Local Election candidates. At least this support is given to two pairs of candidates ; independent (non-party) and the incumbent candidates. The results of this Local Election then stated that the two pairs of candidates managed to come out as the top two positions out of the five pairs of candidates competing. This study uses a qualitative approach with case study methods and the research informants using purposive sampling technique. The theory used to assist this research is the toerization of Fredrik Barth (1969) from the instrumentalist approach which sees ethnicity in politics as a process of manipulation or ethnic mobilization to show each other's ethnicity. In this study, it was found that Adat stakeholders played an important role, namely as a mobilizer of their mass base through Adat instruments to support certain candidates in the Local Election. The power and networking are used as a means of conveying messages of support for candidates supporting election candidate participants in many forms. Adat in the findings of this study became the instrument of the Adat stakeholders.*

**Keywords:** Adat Stakeholders, Mobilization, Local Eletion, Tribe (clan)

## 1. PENDAHULUAN

Karya ini membahas bagaimana peran pemangku adat dalam Pilkada (pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi tahun 2015). Terdapat beberapa fenomena yang menarik untuk dikaji dari Pilkada tersebut, salah satunya adalah fenomena adanya dukungan dari pemangku adat kepada calon kepala daerah yang maju dalam Pilkada Kota Bukittinggi tahun 2015. Setidaknya terdapat dua calon kepala daerah yang mendapat dukungan yakni pasangan jalur perseorangan yang kemudian berhasil memenangkan Pilkada dan satunya berasal dari petahana. Dukungan tersebut tidak lepas dari peran ganda calon kepala daerah yang hadir dalam bentuk, *pertama* sebagai calon kepala daerah dan *kedua* sebagai pemangku adat (penghulu adat). Pasangan jalur perseorangan dan petahana yang merupakan calon kepala daerah sekaligus bagian dari pemangku adat tersebut ialah Muhammad Nurmatias dan Irwandi (pasangan nomor urut empat dan dari jalur perseorangan) serta Ismet Amzis (nomor urut lima dan petahana).

Dukungan ini dapat di amati salah satunya pada saat pendaftaran, calon perseorangan mengadakan acara pelepasan dari para pemimpin adat yang disebut dengan istilah *Niniak Mamak Pucuak Bulek Kurai Limo Jorong*. Hadir dalam acara tersebut para pemimpin adat yang mendukung calon ini untuk mendaftar menjadi calon walikota dan wakil walikota (bukittinggi.info, 12 Juni 2015). Bentuk serupa juga terjadi pada pasangan petahana yakni Ismet Amzis dan Zulfahri yakni pada saat pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bukittinggi pasangan ini menjalani proses pelepasan secara adat dan diantar untuk pendaftaran. Disamping itu deklarasi dari ninik mamak kurai limo jorong juga telah dilaksanakan sebelum pendaftaran kepada pasangan ini (padang ekspres, 26 agustus 2015).

Kedua pasang calon di atas merupakan penghulu adat dan layaknya seorang penghulu adat di Nagari<sup>1</sup> Kurai mempunyai kedudukan di lembaga adat yang bernama *Kerapatan Adat Kurai (KAK)*.<sup>2</sup> Posisi dan gelar penghulu adat merupakan representasi dari suku – suku<sup>3</sup> yang ada di Minangkabau khususnya Nagari Kurai. Muhammad Nurmatias, calon kepala daerah dari jalur perseorangan (nomor urut empat) merupakan penghulu adat dari suku Koto dan bergelar adat *Datuak Nan Basa* dan Irwandi sebagai

---

<sup>1</sup> Herman Sihombing dalam Sri Zulchairiyah (2006) menjelaskan bahwa *Nagari* adalah bentuk organisasi kehidupan masyarakat desa dalam sistem pemerintahan desa yang berlaku di daerah Sumatera Barat serta Nagari disini merupakan unit pemerintahan terendah dibawah kecamatan, dan juga merupakan kesatuan wilayah, kesatuan adat dan sekaligus kesatuan administrasi pemerintahan.

<sup>2</sup> Kerapatan Adat Kurai (KAK) merupakan lembaga non formal adat yang terdapat di Nagari Kurai atau saat ini merupakan daerah administratif Kota Bukittinggi. Saat ini di Provinsi Sumatera Barat, bentuk pemerintahan terendah *Nagari* hanya dipakai untuk daerah administratif kabupaten sedangkan untuk daerah administratif kota memakai kelurahan sebagai sistem pemerintahan terendahnya. Dalam beberapa kasus, terdapat kabupaten yang memakai gabungan dalam sistem pemerintahan terendahnya yakni ada yang *Nagari* dan ada yang kelurahan dalam satu kabupaten.

<sup>3</sup>Suku dalam ini merupakan sebuah pembagian lebih kecil dibawah etnis atau beberapa pihak menyamakannya dengan istilah “clan”. Kesuluruhan jenis suku tersebut berada dalam etnis bangsa Minangkabau.

calon wakil kepala daerah bergelar adat *Datuak Batujuah* dari suku Pisang. Begitu juga dengan calon kepala daerah dari petahana, Ismet Amzis merupakan penghulu adat dari suku salayan dengan gelar adat *Datuak Rajo Mangkuto*. Dukungan ini setidaknya bermuara kepada tingginya raihan suara untuk kedua pasangan ini sebagaimana data berikut :

**Figur 1. Peserta pilkada Kota Bukittinggi tahun 2015 dan hasil perolehan suara**

No Urut Pasangan	Nama Pasangan	Partai Pendukung	Perolehan Suara
1	Taslim dan Marfendi	PAN dan PKS	16,59 % / 7074 Suara
2	Febby dan Zul Ifkar Rahim	Partai Hanura, PKB dan PPP	3,54 % / 1508 Suara
3	Harma Zaldi dan Rahmi Brisma	Partai Nasdem dan Partai Golkar	10,52 % / 4468 Suara
4	<b>Muhammad Ramlan Nurmatias dan Irwandi</b>	<b>Perseorangan / Perseorangan</b>	<b>41,80 % / 17.870 Suara</b>
5	<b>Ismet Amzis dan Zulbahri</b>	<b>Partai Demokrat, PDI-P dan Partai Gerindra</b>	<b>27,55 % / 11.786 Suara</b>

Sumber : Hasil Rekapitulasi Pilkada Kota Bukittinggi tahun 2015, KPUD Kota Bukittinggi

Adat dan Pilkada merupakan dua aspek yang menarik untuk dilihat dalam penelitian ini. Pemangku adat merupakan subyek yang tidak hanya berperan utama dalam hal kebudayaan namun dalam berbagai kasus juga memainkan peran sebagai subyek politik. Adat sebagai subyek politik telah lahir dan berkembang begitu lama dan telah mengalami keberhasilan bertahan serta bertransformasi sampai saat ini. Lahirnya demokrasi yang mensyaratkan pemilihan pemimpin dalam bentuk dipilih langsung oleh masyarakat membuat pembahasan mengenai adat sedikit lebih luas. Dalam arena ini adat dianalisis melalui perannya didalamnya Pilkada. Secara lebih detail dilihat dari bagaimana peran pemangku adat dalam Pilkada serta kepentingan dari pemangku adat dalam keterlibatan tersebut. Fredrik Barth melihat etnis dalam politik dengan pendekatan instrumentasi. Dalam pendekatan ini etnis mendapat penekanan dalam aspek sosial politik dan ekonomi (Matthias Koenig, 1998: 4). Proses sosial politik dipandang dengan adanya mobilisasi politik kepada etnis tertentu.

Peran dan keterlibatan pemangku adat dalam politik merupakan suatu hal yang telah berlangsung lama dan telah mengalami perkembangan yang dinamis sampai saat sekarang ini, termasuk dalam pembahasan tentang peran adat dalam Pilkada. Penelitian tentang adat dan politik telah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, salah satunya oleh Ari Dwipayana di Kota Surakarta, Solo dan Denpasar, Bali pada tahun 2004. Ari Dwipayana (2004) dalam penelitian tersebut berusaha menjelaskan bagaimana survivalitas para bangsawan setelah masa kemerdekaan. Hasil dari penelitiannya menemukan bahwa survivalitas para bangsawan dilakukan dengan berbagai cara baik

melalui kekuatan ekonomi, kultural dan melalui jalan partai politik. Cara – cara tersebut digunakan oleh para bangsawan untuk bertahan dan dengan meraih posisi dan kedudukan dalam politik. Senada dengan tersebut, Achdjam Syahfan Umasugi (2009) juga meneliti tentang etnis. Penelitian yang dilakukan oleh Achmad lebih berfokus pada penggunaan etnis dalam konteks Pilkada. Penelitian yang mengambil tempat di Kabupaten Buru tersebut menemukan bahwa etnis menjadi basis instrumen didalam menentukan pasangan kandidat dan pada saat yang sama, partai politik juga menerapkan hal yang serupa.

Disamping itu terdapat Asrinaldi (2017) yang dalam risetnya melihat bagaimana pemangku adat terlibat dalam Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur di Sumatera Barat. Penelitian tersebut menemukan bahwa keterlibatan atau peran pemangku adat dalam Pilkada dapat diidentifikasi pada kekuasaan dan jaringan yang dimiliki oleh pemangku adat. Penggunaan jejaring dan kekuasaan terjadi dalam bentuk mobilisasi kepada pemilih lainnya. Terdapat sebuah kekosongan yang belum banyak dilihat peneliti sebelumnya yakni bagaimana peran pemangku adat yang bekerja dalam mendukung calon kepala daerah. Hal tersebut membawa kepada hipotesis dalam riset ini yakni pemangku adat menggunakan instrumen adat yang dimilikinya berupa jaringan untuk melakukan mobilisasi mendukung calon tertentu dalam Pilkada.

### **Etnis sebagai Instrumen Politik**

Instrumentasi etnis merupakan pembahasan yang berkaitan dengan politik etnis. Dalam beberapa literatur menyebutkan bahwa politik etnis mempunyai keterikatan dengan politik identitas. Baik politik etnis dan politik identitas memiliki dimensi politik yang menarik untuk dibahas. Dalam dimensi politik, etnis senantiasa menjadi perhatian yang besar terutama dalam hubungannya dengan peran pengembangan kesadaran kolektif, kesukuaan sampai dengan tingkat kebangsaan atau negara bangsa (Ubed Abdillah, 2002: 77).

Max Weber dalam bukunya *economy and society* membahas tentang etnis group. Dalam tulisannya tersebut Weber menjelaskan bahwa etnis group adalah “*those human groups that entertain a subjective belief in their common descent because of similarities of physical type or of custom or both, or because of memories of colonization and migration*” (Max Weber, 1968: 389). Disamping itu Weber menjelaskan bahwa kesamaan faktor psikol dan kebiasaan (adat) dari penjelasan sebelumnya menjadi faktor penting dari perkembangan pemangku etnis tersebut. Keberadaan anggota dalam pemangku adat lebih banyak berfungsi untuk kepentingan politik dari pemangku adat tersebut khususnya dalam pengaruh politiknya. Kepercayaan akan adat dan kebiasaan tersebut akan selalu ada meskipun terjadi disintegrasi dalam lingkup nasional.

Teorisasi oleh Max Weber ini kemudian dikembangkan oleh Fredrik Barth dalam tulisannya *ethnic groups and boundaries*. Fredrik Barth (1969) melihat permasalahan etnis dalam dimensi politik. Terdapat dua kerangka besar pendekatan dalam melihat etnis dalam politik. *Pertama*, pendekatan konstruktivitas. Dalam pendekatan ini, etnis dilihat

dari faktor bahasa daerah, budaya dan atau kultur serta ikatan kekerabatan melalui keluarga atau lebih sederhana dengan simbol – simbol identitas. Penjelasan ini memiliki kesamaan dengan penjelasan Max Weber sebelumnya. *Kedua*, pendekatan instrumentalis. Dalam pendekatan ini etnis dilihat dilihat dengan adanya proses manipulasi atau mobilisasi etnis dalam politik khususnya untuk menunjukkan etnis masing – masing.

Lebih lanjut, pendekatan instrumentasi dalam melihat etnis dalam konteks pemilu merupakan suatu pendekatan yang memberikan perhatian kepada proses sosial politik dan ekonomi (Matthias Koenig, 1998: 4). Proses sosial politik dipandang dengan adanya mobilisasi politik kepada etnis tertentu dan ekonomi dilihat dalam konteks kepentingan bisnis. Dalam riset ini mobilisasi dilihat dari segi penggunaan adat sebagai instrumen oleh pemangku adat untuk mengerahkan anggota komunitas untuk kepentingan dalam Pilkada.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berlokasi di Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat. Adapun unit analisis dalam penelitian ini adalah lembaga adat yang menaungi para pemangku adat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Melalui pendekatan kualitatif diharapkan mampu memberikan gambaran secara utuh dan mendalam terkait fokus dari riset ini. Sumber data dalam penelitian ini terbagi atas dua yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer di dapat melalui informasi informan kunci dari kedua pasang calon yang diambil menggunakan teknik *purposive sampling* dengan hasil sebanyak 11 orang informan. Melalui teknik ini, informan yang terpilih diharapkan lebih tepat dan terlibat langsung dalam fenomena yang diteliti. Pengumpulan data primer dilakukan dengan teknik wawancara mendalam (*indepth interview*). Sedangkan data sekunder bersumber dari berbagai hal seperti dokumen sumber resmi KPU seperti dokumen penetapan hasil Pilkada dan sumber berita online yang berkaitan dengan Pilkada. Setelah data dikumpulkan, data dianalisis dengan teknik analisis emik dan etik.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Peran Ganda Pemangku Adat

Pemangku adat atau penghulu adat merupakan subyek yang tidak hanya berperan dalam hal kultural namun dalam pelbagai kasus juga memainkan peran sebagai subyek politik. Hal tersebut dapat dilihat dalam konteks Pilkada Kota Bukittinggi tahun 2015. Pilkada yang telah berlangsung tersebut menekankan peran pemangku adat sebagai subyek politik dan hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana pemangku adat terlibat dalam Pilkada dengan menjadi tim pemenang pasangan calon kepala daerah dalam berbagai posisi.

Penyataan di atas dapat ditelusuri dari dokumen penetapan tim pemenang yang memperlihatkan pemangku adat/ penghulu adat terlibat dalam tim pemenang dengan

mengisi posisi penting seperti penasehat tim pemenangan bahkan sebagai ketua tim pemenangan.<sup>4</sup>

Keterlibatan dalam tim pemenangan salah satu calon kepala daerah dapat dilihat sebagai aspek politik dan secara tidak langsung menegaskan bahwa pemangku adat terlibat dalam politik di tingkat lokal yakni Pilkada. Keterlibatan pemangku adat dalam tim pemenangan tidak hanya dalam posisi penasihat namun jika kita elaborasi lebih dalam, pemangku adat juga terlibat dalam posisi penting, salah satunya sebagai ketua tim pemenangan pasangan petahana yang membawahi seluruh tim serta terlibat dalam berbagai bidang dalam tim pemenangan.

Salah satu alasan utama keterlibatan itu adalah karena adanya ajakan dari pasangan calon untuk membantu calon tersebut dalam Pilkada.<sup>5</sup> Hal tersebut bermula dari kedatangan pasangan calon kepala daerah mendatangi para pemangku adat, terutama para pemangku adat yang mempunyai peran sentral dalam lembaga adat. Kedatangan selain meminta petunjuk juga untuk mengajak bergabung dalam tim pemenangan. Kedatangan dan tawaran ini menandakan bahwa pemangku adat mempunyai posisi dan daya tawar kepada para calon yang telah datang menemui mereka. Fenomena ajakan untuk mendukung calon dalam Pilkada tidak hanya dilaksanakan oleh salah satu pasangan saja, namun dalam riset ini setidaknya pasangan jalur perseorangan dan petahana melakukan hal yang sama.<sup>6</sup>

Jika kita menelaah lebih dalam, terdapat sebuah alasan kenapa para calon kepala daerah mendatangi para pemangku adat untuk meminta dukungan yakni pemangku adat merupakan pimpinan adat yang jelas memiliki basis massa nya tersendiri. Basis massa ini merupakan potensi sumber suara yang bisa dioptimalkan oleh pasangan calon dalam pemilihan nantinya. Ini tampak dari para pemangku adat yang didatangi oleh pasangan calon adalah pemangku adat yang memiliki jabatan di lembaga adat dan sedikit banyaknya memiliki pengaruh bagi basis massanya.<sup>7</sup>

Data diatas juga menunjukkan bahwa pemangku adat terlibat langsung dengan menjadi tim pemenangan pasangan calon juga memberikan sebuah pernyataan yakni pemangku adat mempunyai dua peran utama atau peran ganda dalam hal ini, *pertama* sebagai pemangku adat dan *kedua* dalam konteks politik terlibat langsung dalam Pilkada dengan menjadi bagian dari tim pemenangan pasangan jalur perseorangan maupun pasangan petahana. Temuan ini menarik untuk ditelusuri lebih lanjut tentang bagaimana peran pemangku adat dalam tim pemenangan, khususnya yang berkaitan dengan pengumpulan dukungan suara dalam Pilkada.

---

<sup>4</sup> Dokumen Surat Keputusan Tim Pemenangan Pasangan Ramlan Nurmatias

<sup>5</sup> Data primer peneliti berupa wawancara dengan salah satu pemangku adat A

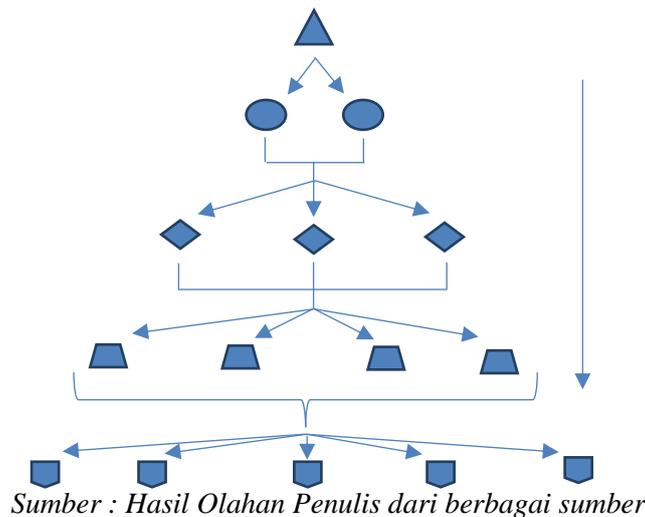
<sup>6</sup> Data primer peneliti berupa wawancara dengan salah satu pemangku adat B

<sup>7</sup> Dokumen struktur kelembagaan Kerapatan Adat Kurai (KAK)

**Mobilisasi Massa dan Pemangku Adat**

Peran pemangku adat dalam Pilkada tidak hanya dalam sebatas direkrut menjadi tim pemenangan namun lebih dari pada itu. Para pemangku adat yang telah menjadi tim pemenangan berfungsi lebih lanjut untuk membantu kemenangan calon kepala daerah yang telah mereka dukung, salah satunya melalui jalan mobilisasi pemilih. Mobilisasi pemilih tersebut dilakukan dengan memanfaatkan basis massa atau basis legitmasi pemangku adat dari setiap suku atau dengan memanfaatkan struktur hierarki pada lembaga adat untuk memobilisasi para pemangku adat atau penghulu adat yang posisinya berada ditingkat bawah dalam struktur hierarki kepemimpinan pada lembaga adat oleh penghulu adat yang memiliki posisi lebih tinggi. Disamping itu mobilisasi tidak hanya berlangsung dengan memobilisasi pemangku adat berdasarkan hierarki, namun setiap pemangku adat juga memobilisasi kepada basis massa dari komunitas suku mereka masing – masing. Secara sederhana struktur kepemimpinan adat dapat digambarkan melalui figur berikut;

**Bagan 1. Struktur hierarki pimpinan adat di Kota Bukittinggi**



Keterangan :

-  = Lembaga Kerapatan Adat Kurai (KAK) Level Nagari
-  = Penghulu adat ber-lima level Nagari
-  = Penghulu adat ber-sembilan level Nagari
-  = Penghulu adat ber-dua belas level Nagari
-  = Penghulu adat ber-seratus level Jorong
-  = Garis Hierarki

Gambaran bagan diatas merupakan struktur organisasi lembaga adat dengan keseluruhan posisi berjumlah seratus dua puluh enam orang. Lima berada pada level Nagari, struktur dibawahnya berjumlah sembilan orang dan selanjutnya berjumlah dua belas orang dan pada struktur terakhir berjumlah seratus orang. Disamping itu, setiap pemangku adat memiliki basis massa mereka sendiri yakni basis komunitas suku. Setiap pemangku adat memiliki basis massa (mamak) sekitar 30 sampai 40 mamak dan seorang mamak menjadi pemimpin dari keluarga besar sesuku dari ibu yang jumlahnya dapat mencapai empat sampai lima keluarga. Jika kita kalikan dengan mengambil angka terendah sebesar 30 mamak dan seorang mamak memimpin empat keluarga berarti seorang penghulu adat memimpin sekitar 120 keluarga dan jika satu keluarga berisikan minimal empat orang berarti seorang penghulu adat memimpin sekitar 480 orang dalam jumlah minimal.

Bisa kita analogikan untuk Kota Bukittinggi yang memiliki 126 pemimpin atau penghulu adat, berarti lembaga Kerapatan Adat Kurai (KAK) memiliki basis massa setidaknya 60.480 (480 orang x 126 penghulu adat) orang massa. Angka itu semua diperoleh berkat sistem kekerabatan matrilineal dan sistem adat yang berlaku di Nagari Kurai. Jumlah tersebut sekitar 51,64 % dari penduduk Kota Bukittinggi yang tahun 2014 berjumlah 117.097 jiwa (BPS Kota Bukittinggi, 2015). Atas dasar inilah mobilisasi kepada basis massa dari penghulu adat menjadi pilihan dari calon kepala daerah kepada pemangku atau penghulu adat.

Mobilisasi dalam Pilkada tersebut terjadi beberapa kesempatan seperti *Pertama*, pada saat mengumpulkan kartu tanda penduduk untuk menjadi bukti dukungan pasangan jalur perseorangan. Jika kita merunut kepada dasar hukumnya yang di atur dalam pasal 42 UU Nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan UU No 1 Tahun 2015 tentang penetapan Perpu No 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang, dalam dokumen tersebut termuat syarat pencalonan untuk calon jalur perseorangan. Salah satu syarat terberat oleh calon yang berasal dari jalur perseorangan untuk calon Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota adalah terkait dengan jumlah syarat dukungan dari masyarakat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang ditetapkan tanggal 29 September 2015, calon perorangan harus kumpulkan Kartu Tanda Penduduk 10% di daerah dengan jumlah daftar pemilih tetap sampai 250.000 orang, 8,5% di daerah dengan DPT antara 250.000 sampai 500.000 orang, 7,5% di daerah dengan DPT antara 500.00 sampai 1.000.000 orang, dan 6.5% di daerah dengan DPT di atas 1.000.000 orang.

Dalam konteks Kota Bukittinggi, pasangan jalur perseorangan setidaknya harus mengumpulkan 11.000 KTP dukungan dan pada saat pendaftaran, tim kampanye pasangan jalur perseorangan mendaftar dengan membawa 12.028 KTP dukungan (bukittinggi.info, 12 Juni 2015). Jumlah ini dirasa cukup dimana penduduk Kota Bukittinggi ketika tahun 2014 berjumlah 117.097 (BPS Kota Bukittinggi, 2015).

Hasil dari temuan lapangan penulis menemukan proses pengumpulan kartu tanda penduduk tersebut tidak lepas dari peran pemangku adat dalam memobilisasi basis massanya dan faktor uang.<sup>8</sup> Keterikatan suku sebagai tim sukses membawa pada dukungan langsung dengan menggunakan atribut yang ada pada dirinya untuk kepentingan dukungan ini. Jalannya ialah melalui mobilisasi menggunakan basis massanya. Basis massa dari penghulu adat ada dua yakni penghulu adat lainnya yang berada diposisi pengulu adat ditingkat atas dan basis massa dari masing – masing pemangku adat berupa keluarga satu suku.

Dalam berlangsungnya mobilisasi menggunakan jalan pemangku adat untuk pengumpulan KTP dukungan, hal tersebut diiringi dengan sejumlah dana pendamping yang bersumber dari tim pemenangan pasangan jalur perseorangan.<sup>9</sup> Temuan ini mensyaratkan bahwa hubungan yang terbentuk salah satunya atas dasar ikatan materi. Sejumlah material yang dikeluarkan tersebut disebut dengan istilah “uang lelah” atas jasa yang telah mereka lakukan. Bisa kita lakukan simulasi berapa jumlah uang yang dibutuhkan untuk mengumpulkan 12.000 dukungan KTP.

Bentuk ini memberikan pemahaman bagaimana mobilisasi massa dalam mendukung calon tertentu pada saat pendaftaran dengan mengumpullkan KTP terjadi dalam Pilkada dan hal tersebut diiringi dengan sejumlah uang yang disebut dengan uang lelah. Dalam kasus pasangan petahana, pasangan ini tidak membutuhkan KTP untuk maju dalam Pilkada karena mendapat dukungan dari partai politik dan konversi jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi basis pencalonan. Dalam fenomena konteks pendaftaran, pasangan petahana tidak luput dari peran pemangku adat. Hal ini setidaknya tergambar dari dukungan – dukungan dari pemangku adat kepada pasangan petahana.<sup>10</sup>

Cara dan bentuk yang dilakukan oleh pasangan jalur perseorangan maupun pasangan petahana tetap menggunakan jalan pemangku adat dan pengaruh faktor materi (uang). Dalam konteks pasangan jalur perseorangan, mobilisasi dilakukan oleh penghulu adat dengan mengumpulkan kartu tanda penduduk dari basis massa dan komunitasnya sedangkan petahana menggunakan penghulu adat untuk menjaring dukungan dari penghulu adat lainnya. Setiap tindakan tersebut akan dihargai dengan sejumlah materi.

Hasil dari temuan lapangan penulis menemukan proses pengumpulan kartu tanda penduduk tersebut tidak lepas dari peran pemangku adat dalam memobilisasi basis massanya dan faktor uang.<sup>11</sup> Keterikatan suku sebagai tim sukses membawa pada dukungan langsung dengan menggunakan atribut yang ada pada dirinya untuk kepentingan dukungan ini. Jalannya ialah melalui mobilisasi menggunakan basis massanya. Basis massa dari penghulu adat ada dua yakni penghulu adat lainnya yang

---

<sup>8</sup> Data primer peneliti berupa wawancara dengan salah satu pemangku adat B

<sup>9</sup> Data primer peneliti berupa wawancara dengan tim pemenangan calon jalur perseorangan

<sup>10</sup> Data primer peneliti berupa wawancara dengan tim pemenangan calon jalur petahana

<sup>11</sup> Data primer peneliti berupa wawancara dengan salah satu pemangku adat B

berada diposisi pengulu adat ditingkat atas dan basis massa dari masing – masing pemangku adat berupa keluarga satu suku.

Dalam berlangsungnya mobilisasi menggunakan jalan pemangku adat untuk pengumpulan KTP dukungan, hal tersebut diiringi dengan sejumlah dana pendamping yang bersumber dari tim pemenangan pasangan jalur perseorangan.<sup>12</sup> Temuan ini mensyaratkan bahwa hubungan yang terbentuk salah satunya atas dasar ikatan materi. Sejumlah material yang dikeluarkan tersebut disebut dengan istilah “uang lelah” atas jasa yang telah mereka lakukan. Bisa kita lakukan simulasi berapa jumlah uang yang dibutuhkan untuk mengumpulkan 12.000 dukungan KTP.

Bentuk ini memberikan pemahaman bagaimana mobilisasi massa dalam mendukung calon tertentu pada saat pendaftaran dengan mengumpulkan KTP terjadi dalam Pilkada dan hal tersebut diiringi dengan sejumlah uang yang disebut dengan uang lelah. Dalam kasus pasangan petahana, pasangan ini tidak membutuhkan KTP untuk maju dalam Pilkada karena mendapat dukungan dari partai politik dan konversi jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi basis pencalonan. Dalam fenomena konteks pendaftaran, pasangan petahana tidak luput dari peran pemangku adat. Hal ini setidaknya tergambar dari dukungan – dukungan dari pemangku adat kepada pasangan petahana.<sup>13</sup>

Cara dan bentuk yang dilakukan oleh pasangan jalur perseorangan maupun pasangan petahana tetap menggunakan jalan pemangku adat dan pengaruh faktor materi (uang). Dalam konteks pasangan jalur perseorangan, mobilisasi dilakukan oleh penghulu adat dengan mengumpulkan kartu tanda penduduk dari basis massa dan komunitasnya sedangkan petahana menggunakan penghulu adat untuk menjaring dukungan dari penghulu adat lainnya. Setiap tindakan tersebut akan dihargai dengan sejumlah materi.

*Kedua*, selain hal di atas, mobilisasi juga berlangsung pada saat kampanye politik. Pada proses ini pemangku adat juga mempunyai andil besar dalam mobilisasi massa. Mobilisasi yang dilakukan tetap dengan menggunakan basis massa dari penghulu adat. Dalam penelitian lapangan, penulis menemukan keterlibatan pemangku adat dalam kampanye tidaklah secara menyeluruh. Pengelolaan kampanye tetap dikelola oleh tim kampanye tersendiri dari masing – masing tim pemenangan. Fungsi pemangku adat disini hanya dalam fungsi mobilisasi massa untuk ikut terlibat dalam proses kampanye. Pemangku adat hanya memberikan input dan nantinya dikelola oleh tim tersendiri. Keterlibatannya pun beragam, ada yang berlandaskan atas kesukuan meskipun hanya sebatas formalitas dan kenyatannya faktor materi jauh lebih menyakinkan.

---

<sup>12</sup> Data primer peneliti berupa wawancara dengan tim pemenangan calon jalur perseorangan

<sup>13</sup> Data primer peneliti berupa wawancara dengan tim pemenangan calon jalur petahana

Observasi peneliti menemukan bahwa terdapat sejumlah pembayaran yang dibayarkan kepada basis massa dari pemangku adat yang mau datang pada saat kampanye politik<sup>14</sup>. Fenomena ini bertujuan untuk mengajak basis massa pemangku adat untuk mau datang pada saat kampanye politik. Hal ini dapat dipahami bahwa hubungan yang terbentuk melalui penghulu adat juga didasari oleh hubungan material. Sekilas tidak terdapat perbedaan dengan timsukses lainnya. Bentuk yang terjadi disini ialah faktor mobilisasi oleh penghulu adat berada pada taraf ajakan untuk bergabung menjadi tim pemenangan dan tim kampanye. Orang yang dilibatkan merupakan anak dan kemenakan dari basis massa serta komunitas pemangku adat yang mendukung calon tertentu. Dalam fenomena ini juga ditemukan bahwa mobilisasi yang dilakukan juga diiringi dengan sejumlah materi.

Bentuk dan sistem berbeda pada tim pasangan jalur perseorangan menemukan hal yang berbeda. Dari hasil data wawancara dan data sekunder, pengorganisasian tim jalur perseorangan lebih terorganisir. Pengelolaan tim kampanye yang tersendiri dan melibatkan pihak konsultan menjadi salah satu alasannya.<sup>15</sup> Lebih lanjut, dalam tim jalur perseorangan, keberadaan tim konsultan sangatlah penting mengingat seleksi ketat yang mereka terapkan. Meskipun sistem ketat yang diterapkan, namun pemangku adat tetap memiliki peran disini. Peran pemangku adat tidak langsung memasukkan anggota komunitasnya menjadi bagian dari tim pemenangan tapi dengan mendaftarkan mereka menjadi tim pemenangan dan nanti akan diseleksi kembali oleh tim konsultan pasangan jalur perseorangan

Berdasarkan penjelasan diatas terlihat bagaimana peran dari pemangku adat pada masa kampanye di dalam tim jalur perseorangan. Orang – orang yang diusulkan oleh pemangku adat untuk menjadi bagian tim pemenangan akan diseleksi kembali oleh tim konsultan terlebih dahulu sebelum disetujui masuk dalam tim. Faktor material lagi – lagi tidak bisa dilepaskan dalam konteks Pilkada. Berdasar pengamatan penulis, setiap tindakan atau kegiatan ada materinya (uang). Keuntungan materil yang diterima oleh massa sudah ada ketetapanya tersendiri oleh tim konsultan ketika lolos menjadi tim pemenangan dan “uang lelah” untuk pemangku adat juga memiliki tolak ukur nya sendiri.

Dalam penelitian lapangan juga ditemukan peran pemangku adat tidak hanya sebatas memberikan rekomendasi dan memasukkan orang – orangnya dalam tim kampanye namun juga ikut dalam kampanye terbuka dilapangan. Fenomena ini semua berlangsung di kedua belah tim baik tim pasangan jalur perseorangan maupun tim petahana. Pemangku adat memainkan peran disini meskipun derajat keterlibatan dalam hal sebagai mobilisator berbeda dalam kedua tim. Mobilisasi itu bergerak dengan jubah adat namun dalam kenyataannya, faktor material tetap menjadi tujuan akhir dari itu

---

<sup>14</sup> Data primer peneliti berupa wawancara dengan tim pemenangan calon jalur petahana

<sup>15</sup> Data primer peneliti berupa wawancara dengan tim pemenangan calon jalur perseorangan

semua. Bagaimana adat berperan sebagai mobilisasi dengan identitasnya berusaha ditampilkan dalam temuan ini.

*Ketiga*, mobilisasi massa oleh pemangku adat juga terjadi pada masa pemilihan. Masa menjelang pemilihan merupakan masa sangat menentukan baik sebelum pemilihan maupun sesudah pemilihan sampai penghitungan suara. Ini semua waktu krusial. Dalam beberapa pelajaran di daerah lain, kita sering mendengar adanya istilah “serangan fajar” / politik uang yang bertujuan untuk membeli suara dari pemilih. Itu semua rentan terjadi pada masa – masa ini. Hal ini disadari oleh masing – masing tim dan tentunya setiap tim mengambil tindakan untuk melindungi kepentingan mereka.

Strategi berbeda tampak terjadi pada tim jalur perseorangan, dari awal mereka telah menyadari akan pentingnya masa – masa menjelang pemilihan. Dari hasil penelurusan penulis, ditemukan adanya kekurangan anggota tim (saksi) pada saat menjelang masa pemilihan. Solusinya ialah dengan menambah saksi – saksi dari sebelumnya telah direncanakan. Saksi – saksi ini penting untuk ditempatkan dimasing – masing TPS dan kejujuran dari saksi sangat mahal harganya disini. Seperti yang telah diutarakan sebelumnya, tim konsultan pasangan jalur perseorangan sangat ketat dalam menyeleksi calon tim pemenangan baik untuk kampanye maupun untuk menjadi saksi. Seleksi ketat inilah menjadi salah satu kendala dalam rekrutment saksi untuk masa pemilihan.

Pada masa ini posisi pemangku adat tetap memainkan peran penting. Pemangku adat menjadi saksi cadangan dari tim pemenangan ini. Keberadaan pemangku adat yang kuat dengan basis massanya menjadi andalan tersendiri bagi tim pemenangan jalur perseorangan dalam mengawasi TPS selain saksi resmi.<sup>16</sup> Dalam konteks ini, tim pemenangan berfikir bahwa dengan basis massa yang besar, penghulu adat dapat memainkan peran pengawas cadangan dari saksi resmi yang telah dibentuk. Letak mobilisator nya tetap berada pada penghulu adat. Para penghulu adat mengumpulkan para penghulu adat lainnya yang berada dalam struktur kepemimpinannya dan menebar hal ini serta mensosialisasikannya kepada anak kemenakan sendiri untuk ikut mengamankan suara dari pasangan jalur perseorangan. Melalui jalan ini, peran penghulu adat sebagai mobilisator mendapat kejelasan. Fenomena ini tidak penulis temukan pada pasangan petahana. Peran mobilisator oleh pemangku adat tidak kelihatan pada tahapan ini. Tim pemenangan tidak begitu intensif untuk meraih kekuasaan dengan mendudukkan dukungannya. Hal ini setelah penulis telaah lebih jauh, terdapat beberapa permasalahan dalam tim pemenangan. Faktor prediksi akan kalah dan faktor keuangan menjadi isu utama.<sup>17</sup>

Temuan diatas menjadi menarik dari penelitian ini. Peran dan fungsi dari kelompok adat bisa dianalisis lebih jauh melalui tahapan atau proses Pilkada. Masing – masing tahapan memiliki corak nya tersendiri jika kita analisis berdasarkan faktor

---

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> Data primer peneliti berupa wawancara dengan tim pemenangan calon jalur petahana

mobilisasi politik. Ada derajat tertentu dari fungsi pemangku adat sebagai mobilisator dengan memanfaatkan instrumen adatnya.

#### 4. KESIMPULAN

Terhadap temuan dan analisis sebelumnya, terdapat beberapa kesimpulan untuk dalam karya ini :

1. Pemangku adat dalam Pilkada Kota Bukittinggi berperan ganda yakni pada satu sisi sebagai pemangku adat dan pada sisi lain terlibat dalam bagian dari tim pemenangan pasangan jalur perseorangan maupun pasangan petahana
2. Adat dalam konteks Pilkada menjadi instrumen oleh pemangku adat didalam mobilisasi politik.
3. Keterlibatan pemangku adat tersebut tersebar disemua calon, baik pasangan jalur perseorangan maupun pasangan petahana.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdilah S,Ubed. (2002). *Politik Identitas Etnis ; Pergulatan Tanda Tanpa Identitas*. Magelang ; Indonesia Tera.
- Asrinaldi. (2017). Power Network of Penghulu Adat in The Concurrent Regional Election in West Sumatera. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol 21. Issue 1 July 2017.
- Barth, Fredrick. (1969). *Ethnic Group and Boundaries*. United States ; Little, Brown and Company.
- Dwipayana, Ari. (2004). *Bangsawan dan Kuasa; Kembalinya para ningrat di dua kota*. Yogyakarta ; IRE Press.
- Koenig, Matthias, (1998). *Discussion Paper 30*. Democratic Governance in Multicultural Societies. Germany ; Institute for Sociology University of Marburg.
- Lemmasrizal. (2015, Juni 12). Duo Datuak Resmi Mendaftar ke KPUD. Bukittinggi.info. diakses dari <http://www.bukittinggi.info/2015/06/duo-datuak-resmi-mendaftar-ke-kpud.htm>,
- News. Detik (2015, Desember 09). 264 Kabupten Kota Laksanakan Pilkada Serentak. *News.Detik*. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/3091405/264-kabupatenkota-laksanakan-pilkada-serentak-pilih-calonmu/komentar>,
- Padang Ekspres. (2015, 29 Agustus). Dilepas secara adat, diantar ninik mamak.
- Syahfan, Achmad Umusagi. (2009). *Tesis*. Instrumentasi etnis dalam pilkada langsung ; Studi peran etnis dalam kontestasi politik di pilkada langsung Kabupaten Buru

Provinsi Maluku tahun 2006. Tidak dipublikasikan. Yogyakarta ; FISIPOL UGM.

Weber, Max. (1968). *Economy and Society ; an Outline of Interpretive Sociology*. United States ; California University Press.

Zulchairiyah, Sri. (2006). *Nagari Minangkabau dan Desa di Sumatera Barat*. Padang ; Kaukus Perempuan Penyelenggara Pemilu Sumatera Barat.